



LAPORAN
DELEGASI DPR-RI KE SIDANG PARLIAMENTARY SIDE EVENT AT
THE UNITED NATIONS HIGH LEVEL POLITICAL FORUM (HLPF)
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
TANGGAL 16 – 17 JULI 2018
DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT

I. PENDAHULUAN

Negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menyepakati Agenda 2030 bagi Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi pada Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Agenda Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 di New York tanggal 25 September 2015. Agenda ini memuat 17 *goals* dan 169 *targets*, yang mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup).

Sebagai bentuk komitmen seluruh masyarakat dunia, SDGs membuat *High Level Political Forum* (selanjutnya disingkat HLPF) *on Sustainable Development* yang digunakan sebagai mekanisme *follow-up* dan *review*. Konperensi ini mengundang negara-negara anggota PBB agar demi tercapainya program-program pembangunan berkelanjutan bersama.

Konperensi HLPF terdiri dari 2 acara utama, yaitu, *Parliamentary Side Event of the 2018 High Political Forum* yang diadakan pada tanggal 16 Juli 2018, dan juga *Parliamentary Workshop of the 2018 High Political Forum* yang diadakan pada tanggal 17 Juli 2018.

Delegasi DPR-RI menghadiri sidang *Parliamentary Side Event* yang menjadi salah satu agenda dari konperensi HLPF yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Juli 2018. Konperensi ini mengambil tema “*Transformation towards Sustainable and Resilient Societies.*” Pada HLPF tahun ini fokus pada pembahasan Goal 6 (air dan sanitasi),

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

- Undangan dari *Inter Parliamentary Union (IPU)*, untuk menghadiri *2018 High Level Political Forum*.
- Berpartisipasi aktif dan bertukar pandangan serta pengalaman terkait perkembangan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Dukungan untuk kegiatan mengenai perkembangan program SDGs di Indonesia.
- Memperkuat hubungan kerjasama antar negara serta pihak-pihak yang terlibat dalam program SDGs.
- Melaksanakan Diplomasi Parlemen.

D. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan yang telah dilakukan ke *The United Nations High Level Political Forum (HLPF)* ini yaitu meminta masukan dari Kementerian Luar Negeri RI dan pihak-pihak terkait..

II. ISI LAPORAN

A. Agenda Konperensi

Konperensi *Parliamentary Side Event at The United Nations HLPF* dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2018, meliputi :

- *Parliamentary Side Event of the 2018 High Level Political Forum (16 Juli 2018)*

Panel membahas aspek-aspek kunci keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dari sudut pandang salah satu SDGs yang ditinjau pada sesi HLPF, yaitu Goal 12 yaitu untuk memastikan konsumsi berkelanjutan dan pola produksi.

- ***Parliamentary Workshop of the 2018 High Level Political Forum (17 Juli 2018)***

Membantu anggota Parlemen meninjau proses-proses kunci dan mengidentifikasi celah-celah kelembagaan dalam kerja parlemen tentang SDGs. Workshop ini dirancang untuk memungkinkan parlemen membahas masalah, mengumpulkan informasi, dan menjawab pertanyaan yang membantu mereka membuat keputusan-keputusan berdasarkan informasi tentang cara yang paling tepat dan efektif untuk terlibat dalam penerapan SDGs.

B. Jalannya Konferensi

Dalam Konferensi HLPF 2018, IPU (*Inter-Parliamentary Union*) mengadakan *Parliamentary Side Event* yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018. Acara ini dibuat untuk Anggota Parlemen dalam rangka ikut berpartisipasi mendiskusikan tema dari sudut pandang Goal 12 tentang Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (SCP). Dalam diskusi ini, pembahasannya seputar pertanyaan:

- 1) Apakah pendekatan saat ini cukup untuk mengubah pola konsumsi dan produksi, khususnya di negara maju agar ke depannya dapat memulihkan kelestarian lingkungan global untuk jangka panjang?
- 2) Dapatkah ekonomi global terus dibangun di atas asumsi pertumbuhan tanpa batas meskipun sumber daya alam semakin terbatas?
- 3) Dapatkah ekonomi hijau baru hadir untuk membantu negara-negara memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsisten dengan kapasitas regeneratif alam, mengingat tingkat pembangunan ekonomi yang datang dari latar belakang negara-negara yang sangat beragam?

Sebagaimana tercatat pada pertemuan yang diadakan sebelumnya, konsumsi dan produksi global masih jauh di atas kapasitas regeneratif lingkungan. Sementara itu kebutuhan ekonomi mungkin tumbuh dalam hal moneter, yang mengakibatkan mereka juga secara tidak langsung merusak basis sumber daya mereka sendiri dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.

Penghitungan jejak ekologis menunjukkan bahwa konsumsi dan pola produksi saat ini terus menuntut lebih dari yang dapat dihasilkan alam. Sebagian besar defisit ekologis ini dapat dikaitkan dengan gaya hidup yang tidak lestari di negara-negara maju. Sementara itu, kebanyakan masyarakat negara berkembang terus kehilangan kebutuhan dasar dan lebih sering terkena dampak dari degradasi lingkungan, termasuk perubahan iklim, dibandingkan bagian dunia lainnya.

Pada hari kedua, tanggal 17 Juli 2018, diadakan Workshop dengan agenda sebagai berikut :

- 09.30 Penyambutan dan presentasi tujuan dari workshop
- 09.40 Presentasi tentang *toolkit* SDGs
- 10.00 Diskusi kelompok (sesi pertama)
- 11.00 Laporan diskusi sesi pertama
- 11.20 Diskusi kelompok (sesi kedua)
- 12.20 Laporan diskusi sesi kedua
- 12.40 Kesimpulan dan penutupan



Gambar 1 : Diskusi Kelompok

Workshop yang diadakan ini bertujuan untuk membiasakan para anggota Parlemen terhadap perangkat penilaian diri dan membantu mereka menilai

kesiapan Parlemen untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs di negaranya masing-masing.

C. Partisipasi Delegasi DPR-RI

Delegasi DPR-RI, berpartisipasi dan berdiskusi aktif di dua sesi dalam Konferensi *HLPF* tersebut, yaitu di *Parliamentary Side Event of the 2018 High Level Political Forum (16 Juli 2018)* dan juga *Parliamentary Workshop of the 2018 High Level Political Forum (17 Juli 2018)*.



Gambar 2 : Delegasi DPR RI didampingi Dubes/PTRI untuk PBB, di *Parliamentary Side Event at the United Nations High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development*

Terkait tema tahun ini yaitu *Transformation towards Sustainable and Resilient Societies*, SDGs juga memiliki perhatian terhadap produksi dan konsumsi yang selama ini dinilai tidak berkelanjutan atau pemborosan terkait sumber daya alam. Selanjutnya, SDGs menciptakan *Sustainable Consumption and Production (SCP)* sebagai salah satu sub-tema aksi perwujudan pembangunan berkelanjutan di Deklarasi Rio pada tahun 1992 lalu.

Penerapannya dilanjutkan serta dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation*. Dalam proses selanjutnya, hasil pertemuan *High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on the post-2015 Development Agenda* yang diadakan

di Bali pada tahun 2013 telah menjadikan SCP sebagai salah satu pilar utama bagi *post-2015 Development Agenda*, kemudian menjadi goal ke 12 di SDGs.

Perkembangan SCP di Indonesia dapat dilihat di KLH (Kantor Lingkungan Hidup RI) sebagai *focal point* dalam penerapan SCP. Pada tahun 2012, KLH mengkoordinasikan Forum SCP Indonesia. Sasaran kerjanya adalah *National Action Plan*, termasuk pengembangan infrastruktur informasi terpadu antar pihak tentang pengumpulan sumber daya untuk penerapan SCP (*Indonesian SCP Resource Pool*).

Indonesia melakukan penerapan SCP melalui beberapa perangkat yang telah dikembangkan oleh KLH RI, seperti Produksi Bersih (Eko-efisiensi), verifikasi Kinerja Teknologi Ramah Lingkungan, dan Sistem Manajemen Lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan serta kriteria Eko Label untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan.

Dalam *statement*-nya di sesi *Parliamentary Side Event*, Ketua Delegasi DPR-RI, Dr. Nurhayati Ali Assegaf menghimbau masyarakat dunia untuk melakukan upaya bersama serta memperkuat kerja sama internasional yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan serta trend konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya proses perumusan kebijakan nasional secara rinci dan efektif. Indonesia telah menyusun dokumen untuk mendukung pencapaian SDGs, yaitu: Road Map of SDGs; Rencana Aksi Nasional SDGs, dan Rencana Aksi Sub-Nasional SDGs.

Pertemuan dengan UN Bodies (UN Women, UNDP, UNEP)

Selain menghadiri *Parliamentary event* dan Workshop, Delegasi DPR-RI juga melakukan pertemuan bilateral mengenai perkembangan SDGs di Indonesia dengan *UN bodies* seperti UN Women, UNDP dan juga UNEP. Dalam pertemuan dengan UN Women misalnya, Dr. Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan bahwa

Indonesia mendukung tujuan-tujuan SDGs, sejak mulai dari MDGs (*Millenium Development Goals*) dimana salah satu goalsnya adalah *improve Maternal Health*. Dalam pertemuan ini, Dr. Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan bahwa Indonesia telah berupaya di dalam meningkatkan keamanan melahirkan ibu dan anak. Indonesia telah menyediakan dana khusus untuk Kementerian Kesehatan RI agar Kementerian Kesehatan dapat bekerja lebih baik dan dapat menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.



Selain menyiapkan dana khusus tersebut, Indonesia juga telah memiliki salah satu program yang sangat baik yaitu program *Standby Husband* (Suami Siaga). Program ini sudah mulai dilaksanakan beberapa desa-desa pedalaman. Terdapat bukti epidemiologis dan fisiologis bahwa keterlibatan suami dapat mengurangi stres ibu yang melahirkan (dengan dukungan emosional, logistik dan keuangan), meningkatkan penerimaan perawatan pranatal, mengarah pada penghentian perilaku berisiko (seperti merokok), serta meningkatkan peran sebagai orangtua masa depan mereka sejak tahap awal.

Perwakilan UN Women sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Indonesia ini. Selain itu, mereka juga menghargai upaya-upaya DPR-RI untuk *me-localise*

SDGs di Indonesia dengan cara menerjemahkan dan menjelaskan tentang SDGs dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya, dalam pertemuan dengan pihak UNEP dan UNDP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf mengundang UNEP dan UNDP untuk dapat hadir di *The Second WPFSD* yang akan diadakan di Bali pada tanggal 12-13 September 2018. Khusus dengan UNEP karena tema utama *The Second WPFSD* Bali terkait dengan masalah energi sehingga pihak UNEP juga diundang sebagai salah satu pembicara.

D. Hasil-hasil yang dicapai

Konperensi diakhiri dengan beberapa kesimpulan yaitu :

- 1) Indonesia menjadi salah satu delegasi yang berhasil memaparkan perkembangan penerapan SDGs dengan sangat baik.
- 2) DPR-RI sebagai perwakilan rakyat mempunyai andil yang besar untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat terkait SDGs, agar ke depannya masyarakat dapat lebih mengetahui serta memahami tentang SDGs dan turut aktif di dalam menjalankan program-program SDGs.
- 3) Banyak pihak baik Parlemen-parlemen di dunia maupun organisasi-organisasi internasional/regional yang mengapresiasi inisiatif DPR-RI di dalam membentuk *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD). WPFSD merupakan forum Parlemen terbesar pertama di dunia yang membahas khusus tentang SDGs.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Partisipasi Delegasi DPR RI ke konferensi *HLPF on Sustainable Development* berjalan lancar dan sukses. Undangan kepada DPR-RI untuk menjadi salah satu pembicara dalam forum ini menunjukkan pengakuan PBB terhadap peran aktif DPR-RI selama ini di bidang SDGs. Konferensi ini juga dapat meningkatkan hubungan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara anggota PBB lainnya.

B. Saran

Seiring dengan upaya peningkatan keterlibatan Indonesia dalam program-program SDGs, Ketua Delegasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf juga mengundang negara-negara anggota PBB untuk hadir dalam *The 2nd World Parliamentary Forum On Sustainable Development* yang akan diadakan pada tanggal 12 – 13 September 2018 di Bali. Forum ini sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk pembahasan lebih lanjut terkait SDGs, menegaskan komitmen untuk tercapainya goal-goal SDGs, serta dapat dimanfaatkan juga sebagai forum untuk memperbarui pengetahuan terkait perkembangan negara-negara anggota PBB tentang isu SDGs secara berkesinambungan.

IV. PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI ke *The United Nations High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development* yang telah berlangsung pada tanggal 16 – 17 Juli 2018 di New York, Amerika Serikat.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2018
Ketua Delegasi,

Dr. Nurhayati Ali Assegaf
A - 432